

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, kerangka teoritis tentang migrasi, remitansi, GDP, pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), indeks gini dan kemiskinan akan diulas melalui tinjauan pustaka secara luas. Kajian ini sangat penting dalam memahami masalah, mengidentifikasi metodologi, serta data yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

Pada bagian ini, teori migrasi, remitansi, GDP, pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), indeks gini dan kemiskinan akan dijelaskan secara rinci. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sumber terkait dan untuk memeriksa teori-teori yang relevan yang sesuai untuk penelitian ini.

1. Migrasi Tenaga Kerja

Dalam jangka pendek pasokan tenaga kerja secara agresif dalam suatu masyarakat mungkin sangat inelastis. Hal ini dapat berubah hanya melalui migrasi atau perubahan dalam partisipasi angkatan kerja. Untuk satu kegiatan atau pekerjaan tunggal pasokannya mungkin lebih elastis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berubahnya kegiatan atau pekerjaan buruh yang mempunyai pengaruh seperti yang terjadi pada migrasi dan perubahan dalam partisipasi angkatan kerja (Adisasmita, 2005).

Terdapat banyak alasan untuk menyenangi suatu jabatan yang sama di suatu wilayah tertentu dari pada wilayah lain. Pertama, mungkin karena pendapatannya lebih tinggi. Kedua, suatu masyarakat dengan tingkat biaya hidup murah lebih disenangi. Ketiga, berbagai aspek dari kualitas pekerjaan seperti keamanan, kemudahan dan prospek pengembangan di masa depan turut diperhatikan pula. Kemudian aspek-aspek lain seperti iklim, sosial, dan aksesibilitas perjalanan ke tempat-tempat lainnya juga merupakan daya penarik (Adisasmita, 2005).

2. Efektivitas Migrasi

Manusia bermigrasi karena mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Semakin diberikan informasi kepada mereka, maka akan semakin besar pula kemungkinannya migrasi tersebut dapat memberikan kontribusinya pada alokasi sumber daya manusia secara lebih efisien. Jadi kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan migrasi harus diupayakan dapat membantu para migran yang potensial untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan yang rasional (Adisasmita, 2005).

3. Teori Migrasi

Todaro (1992) memaparkan bahwa selaras dengan kajian ekonomi migrasi internal, teori migrasi yang di kemukakan oleh seorang ekonom Lewis (1954), yaitu mengenai proses perpindahan tenaga kerja dari desa-kota, dimana model yang dilakukan Lewis pada tahun 1954 tersebut

diperluas oleh Fei dan Ranis pada tahun 1961 yang merupakan teori umum yang diterima dan dikenal dengan Model Lewis Fei-Ranis (L-F-R).

Migrasi menurut Badan Pusat Statistik (2015) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu wilayah ke wilayah lain yang melewati batas-batas administratif (migrasi internal) atau batas-batas politik atau negara (migrasi internasional). Secara konseptual, migrasi berarti perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau dari suatu negara ke negara lain. Migrasi atau mobilitas juga berarti pergerakan penduduk secara geografis yang melewati batas-batas daerah menuju ke daerah lain dalam periode waktu tertentu. Terjadi migrasi tenaga kerja disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi ekonomi antar wilayah maupun negara, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. Sikap masyarakat dalam merespon keadaan ini menimbulkan kesadaran untuk melakukan migrasi ke wilayah atau tempat lain yang dapat menjamin adanya kesempatan kerja yang lebih baik dari pada di daerah asal. Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar perpindahan tenaga kerja, seperti adanya perbedaan ekonomi antar wilayah maupun negara, rendahnya penghasila, sulitnya mencari kerja yang sesuai di negara berkembang, serta adanya kesempatan kerja dan upah yang tinggi di negara tujuan (Roganda, 2004).

Perbedaan tingkat upah menjadi salah satu motivasi yang melandasi tenaga kerja untuk melakukan migrasi. Tingkat upah memperhitungkan total pendapatan yang akan diterima dan biaya dari migrasi. Selain motivasi tersebut, terdapat ada beberapa faktor lainnya yang

mendasari keputusan tenaga kerja untuk melakukan mobilitasi (McConnell, dkk, 2010), yaitu:

1. Umur

Studi tentang migrasi secara konsisten menemukan bahwa umur adalah faktor terbesar yang mendasari tenaga kerja melakukan migrasi. Semakin tua umur seseorang, semakin kecil pula kemungkinan orang untuk melakukan migrasi.

2. Faktor keluarga

Biaya yang harus dikeluarkan untuk migrasi akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah anggota keluarga. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang telah menikah memiliki peluang yang lebih sedikit untuk bermigrasi dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum menikah.

3. Pendidikan

Studi yang diperoleh dengan menggolongkan umur, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula peluang tenaga kerja untuk melakukan migrasi.

4. Jarak

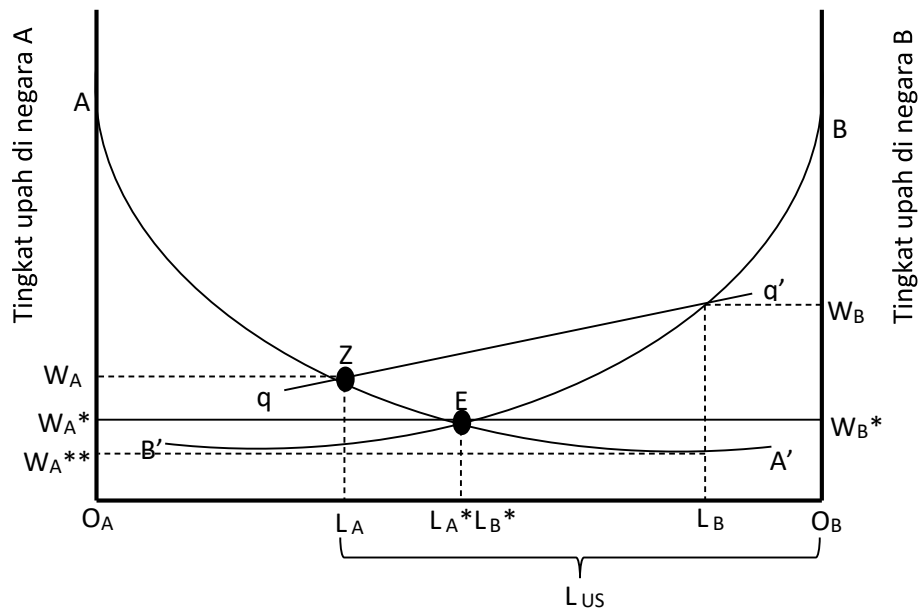
Kemungkinan tenaga kerja melakukan migrasi berkebalikan dengan jarak yang harus ditempuh untuk pindah. Semakin jauh jaraknya, maka semakin minim informasi yang di dapat, dan biaya untuk migrasi akan ikut meningkat seiring dengan peningkatan jarak.

5. Tingkat pengangguran

Hasil studi menemukan bahwa jika kepala keluarga pengangguran, maka kemungkinan untuk melakukan migrasi menjadi lebih tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran pada suatu daerah memiliki efek yang positif terhadap migrasi keluar.

4. Teori Migrasi Todaro

Model migrasi Todaro bertolak dari asumsi bahwa migrasi pada kenyataannya merupakan suatu fenomena ekonomi. Oleh sebab itu, keputusan untuk melakukan migrasi juga merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Model migrasi Todaro melandaskan diri pada pemikiran bahwa arus migrasi terjadi karena adanya perbedaan pendapatan atau tingkat upah antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, pendapatan yang dibahas pada model ini bukanlah penghasilan sebenarnya, melainkan penghasilan yang diharapkan (*expected income*). Hal yang mendasari model migrasi Todaro adalah bahwa para migran mempertimbangkan dan membandingkan matang-matang berbagai macam pasar tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah, kemudian memilih salah satu diantaranya yang memaksimalkan keuntungan yang diinginkan (*expected gains*) dari melakukan migrasi.



Sumber: Todaro dan Smith 2003

Gambar 2. 1. Model Migrasi Harris-Todaro

Proses pencapaian titik dari ekuilibrium pengangguran (yang akan tercapai setelah tingkat pendapatan yang diharapkan di negara B sama dengan tingkat pendapatan sebenarnya di negara A) yang akan ikut menghentikan arus migrasi (bukan kesetaraan tingkat upah di negara A dan di negara B seperti yang dijelaskan oleh model pasar bebas neoklasik) tersebut bisa juga dikemukakan secara diagramatis menurut model dasar Harris-Todaro dalam Gambar 2.1. Asumsinya bahwa hanya ada dua perekonomian (atau negara), yaitu negara A dan negara B. Garis AA' menyatakan tingkat permintaan tenaga kerja di negara A. Tingkat permintaan tenaga kerja di negara B ditunjukkan oleh garis BB'. Total angkatan kerja yang tersedia disimbolkan oleh $O_A O_B$, dalam perekonomian pasar neoklasik (upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan semua tenaga

kerja akan terserap). Tingkat upah ekuilibrium akan tercipta bila $W_A^* = W_B^*$, dengan pembagian tenaga kerja sebanyak $O_{AL_A}^*$ untuk negara A, dan $O_{BL_B}^*$ untuk negara B. Tenaga kerja yang ada akan diserap oleh kedua negara tersebut, sesuai dengan asumsi penyerapan tenaga kerja penuh (*full employment*) yang diterapkan.

Negara B memiliki tingkat upah sebesar W_B terletak lebih besar dibandingkan W_A^* dan diasumsikan bahwa tidak ada pengangguran yang terjadi. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di negara B sebesar O_{BL_B} , dan tenaga kerja yang bekerja di negara A sebesar O_{AL_B} dengan tingkat upah sebesar W_A^{**} (lebih kecil dari pada tingkat upah pasar W_A^*). Oleh karena itu, akan tercipta ketimpangan atau selisih tingkat upah antara negara B dan negara A sebanyak $W_B - W_A^{**}$. Apabila pekerja yang bekerja di negara A bebas melakukan migrasi, maka meskipun di negara A tersedia lapangan pekerjaan sebesar O_{AL_B} , pekerja akan tetap melakukan migrasi ke negara B untuk mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi.

Perbedaan tingkat upah antara negara A dan negara B akan mendorong seseorang melakukan migrasi dari negara A ke negara B. Nilai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dapat digambarkan oleh kurva qq' . Titik equilibrium yang baru adalah titik Z, selisih pendapatan sebenarnya di negara A dan di negara B sebesar $W_B - W_A$. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di negara A sebanyak O_{AL_A} dengan tingkat upah yaitu sebesar W_A , sedangkan tenaga kerja yang bekerja di negara B sebanyak O_{BL_B} dengan tingkat upah nya sebesar W_B . Sisanya

adalah sebesar $O_{BLA} - O_{BLB}$ akan menganggur atau memasuki kegiatan sektor informal yang berpendapatan rendah.

5. Remitansi

a. Definisi Remitansi

Definisi lain mengenai remitansi menurut *World Bank* dalam Sihombing dan Safaruddin (2007), yaitu pembayaran antar negara dari orang ke orang dengan besaran nilai yang secara relatif kecil, yang dalam prakteknya, transfer uang kiriman tersebut dilakukan oleh para pekerja asing secara berulang kali kepada keluarganya di daerah asal.

Pengertian remitansi berdasarkan Bank Indonesia (2009) yaitu bagian dari gaji atau penghasilan tenaga kerja Indonesia yang dikirim dari keluarganya yang bekerja di luar negeri ke keluarganya yang berada di dalam negeri. Data remitansi TKI tercatat oleh bank Indonesia dalam pos transfer berjalan pada transaksi berjalan. Sejalan dengan itu berkembangnya disiplin ilmu dalam melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan terdapat pengertian lain dari remitansi.

Tabel 2. 1 Definisi Remitansi.

Definisi	Sumber
Remitansi adalah transferan uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima dinegara asalnya	World Bank's World Development Indicator (2016)
Mengirimkan uang dan barang dari orang-orang yang bekerja baik di daerah perkotaan atau luar negeri ke anggota keluarga di negara asal.	Adams & Cuecuecha (2010)
Secara istilah remiten diartikan sebagai kiriman barang atau uang dari tenaga migrant kepada keluarganya di daerah asal sementara migrant masih berada di tempatnya bekerja.	Mafruhah, dkk (2013) Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Menurut tabel diatas, maka remitansi adalah peniriman uang dari tenaga kerja yang bekerja diluar negeri untuk keluarganya didalam negeri.

b. Manfaat Remitansi

Menurut Wulan (2010) remitansi merupakan suatu pemahaman dan pengalaman baru yang didapat selama bekerja di luar daerah. Selain itu ada beberapa studi literatur yang berhasil menjelaskan peran serta akan pentingnya remitansi bagi keluarga migran. Salama (2004) menjelaskan bahwa pengaruh dari migrasi internasional pada kesejahteraan rumah tangga dapat dengan adanya

pengiriman remitansi oleh migran ke keluarganya di daerah asal. Remitansi itu biasanya digunakan untuk memperbaiki rumah, pendidikan, kesehatan, serta untuk modal membuka usaha. Kiriman remitansi ialah salah satu bagian untuk mempererat ikatan dengan daerah asal. Selain itu juga, uang yang dikirim diharapkan dapat membantu dalam menopang pendapatan maupun seluruh kebutuhan rumah tangga yang ditinggalkan di daerah asal. Uang kiriman biasanya tidak digunakan untuk diinvestasikan, tetapi untuk keperluan sosial atau kebutuhan konsumtif lainnya (Forbes 1986 dalam Effendi 2004).

Remitan dapat membantu memberikan distribusi modal ke pedesaan, terutama memberi peluang membuka usaha dan bekerja. Subianto (2006) menemukan keadaan yang begitu khas dalam penggunaan uang remitansi yang digunakan keluarga migran di daerah Cilacap, yaitu untuk merenovasi rumah mereka yang rusak, pembelian kendaraan, pembelian hewan ternak, membeli tanah, dan untuk pembiayaan pendidikan anak maupun saudara mereka. Sedangkan di Lombok Timur, keluarga migran menggunakan remitansi untuk memperbaiki rumah mereka, dikarenakan rumah menjadi salah satu simbol suatu tanda keberhasilan dari migran, dengan demikian dapat meningkatkan status sosialnya di masyarakat (Zid 2010). Pemaparan secara umum tentang pola investasi pendapatan migran adalah sebagai berikut (Mantra, 2009):

- a) Sebagian besar dari investasi dimanfaatkan untuk tujuan investasi materi. Hal tersebut menggambarkan bahwa keinginan untuk memiliki barang, baik barang yang bergerak maupun barang tidak bergerak, sebagai salah satu bentuk status sosial yang berperan banyak bagi sebagian besar migran;
- b) Kegunaan dari investasi itu sendiri untuk pendidikan yang menjadikan sesuatu bagian yang sangat penting bagi sebagian kebanyakan migran yang terlihat dari tinggi rendahnya pendidikan anak/adik dari para migran.
- c) Sebagian migran memanfaatkan investasi pendapatan dalam bentuk investasi modal usaha, maupun dalam pengembangan usaha.
- d) Investasi juga biasanya digunakan untuk tujuan sosial seperti menyantuni orang tua dll.

6. Kemiskinan

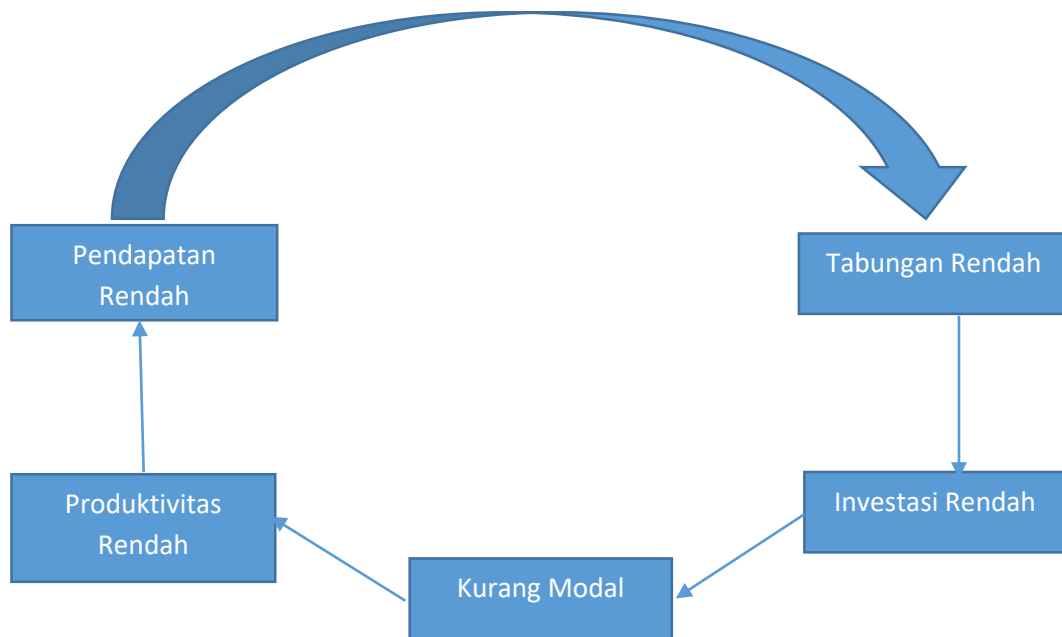
Sering dipahami mengenai kemiskinan adalah sebagai salah satu keadaan dimana seseorang kekurangan uang ataupun barang untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Kemiskinan pula dapat diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok mereka. Menurut Badan Pusat Statistik (2015) kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Adapun pandangan terkait dengan keadaan kemiskinan selanjutnya ialah kemiskinan bukan saja sebatas ukuran dari moneter saja, namun juga

berkaitan dengan miskin kesehatan fisik ataupun nutrisi yang dapat diukur dengan cara memeriksa apakah pertumbuhan dari anak mengalami keterhambatan. Selain itu juga, bisa dilihat dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator-indikator seperti angka buta huruf dan lain sebagainya. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada dikarenakan masyarakat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan untuk keberlangsungan hidup mereka, sehingga penghasilan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk (Nugroho, 1995).

7. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama negara-negara berkembang. Jhingan (2004) menyebutkan terdapat tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. *Pertama*, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan. *kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Permasalahan ini menjerat negara ke dalam lingkaran setan kemiskinan.



Sumber: Jhingan (2014)

Gambar 2.2 *Lingkaran Setan Kemiskinan*

Lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat (Jhingan 2004). Tingkat pendapatan rendah menyebabkan proporsi pendapatan untuk tabungan rendah, yang mencerminkan rendahnya investasi dan kurangnya modal, kemudian mempengaruhi tingkat produktivitas yang menjadi rendah.

a. Indikator kemiskinan

Menurut Adisasmita (2005), indikator dari kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan

(kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.

b. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang terjadi akibat dari ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup mereka. Kemiskinan dapat dikarenakan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan maupun sulitnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN (1999) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu menggunakan tenaga, mental ataupun fisik mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Bappenas (2004) juga memaparkan bahwasanya kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak sanggup dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan kehidupannya yang bermartabat. Adapun kebutuhan dasar masyarakat desa antara lain, mampu terpenuhinya kebutuhan antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam (SDA) maupun lingkungan hidup yang baik, rasa aman dari perlakuan maupun

ancaman dari luar dan tindak kekerasan maupun hak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, baik perempuan maupun laki-laki.

c. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Kuncoro (2000) menjelaskan tentang penyebab dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut makro ekonomi, munculnya kemiskinan karena adanya ketidak samaan atau ketidak merataan pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk yang miskin hanya bisa menggunakan sumber daya dalam jumlah yang sangat terbatas dan kualitasnya yang rendah;
2. Kemiskinan hadir diakibatkan karena adanya perbedaan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah yang berdampak pada produktivitas yang rendah, di ikuti dengan tingkat pendapatannya yang kecil;
3. Adapun penyebab dari kemiskinan sendiri di karenakan perbedaan akses modal dari masing-masing individu.

Ketiga penyebab kemiskinan diatas yaitu kemiskinan karena adanya ketidak sempurnaan dari pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya akses dan arus modal menyebabkan rendahnya akan produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya jumlah

pendapatan yang diterima oleh seseorang. Rendahnya pendapatan akan berimbas pada rendahnya pada tingkat tabungan maupun investasi, rendahnya investasi akan berimbas pada keterbelakangan dan lain sebagainya.

d. Ukuran Kemiskinan

Menurut Adisasmita (2005), beberapa konsep yang digunakan sebagai alat ukur tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan ukuran dari ketimpangan pada distribusi pendapatan, biasanya dapat dikatakan sebagai hubungan dengan tingkat dari rata-rata distribusi yang dimaksud.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi kemiskinan dibawah garis rata-rata, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk mempertahankan hidupnya tidak mampu terpenuhi. Badan Pusat Statistik (1999) mengatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin yaitu penduduk yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar pokok sehari-hari mereka. Sedangkan nilai dari garis kemiskinan yang dipakai dalam batas garis kemiskinan berdasarkan kepada kebutuhan kalori minimum perhari yaitu sebesar

2100 kalori/hari ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti pakaian, pendidikan dan kesehatan dan lain-lain.

Bank Dunia (2000) pun memaparkan bahwa standar internasional dari kemiskinan yang memberikan batas dari garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar lainnya yaitu dengan pendapatan perkapita adalah sebesar US\$ 275 per tahun atau sebesar 2 dollar per hari. Indikator yang telah dijelaskan tadi bersifat multidimensi, artinya setiap keluarga fakir miskin bisa berbeda tingkat kedalaman kemiskinannya. Semakin banyak karakteristik yang terpenuhi semakin fakir keluarga tersebut dan harus diprioritaskan penanganannya.

8. Produk Domestik Bruto

Gross Domestic Product merupakan indikator pembangunan paling klasik. Pertumbuhan GDP yang tinggi dianggap merupakan indikator peningkatan kesejahteraan atau indikator ekonomi. Pertumbuhan GDP diasosiasikan secara langsung dengan pertumbuhan kesejahteraan umat manusia (Hudiyanto, 2015).

9. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan, baik yang benar-benar sedang bekerja, ataupun yang sedang berhenti bekerja sementara dikarenakan berbagai macam alasan (seperti petani yang tidak bekerja karena hujan, pegawai yang sedang cuti dan lain-lain). Menurut

Badan Pusat Statistik (2015) penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun dalam sementara waktu tidak bekerja dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu (15 tahun ke atas atau lebih) yang belum bersedia dalam bekerja atau belum bekerja, yaitu seperti pelajar ataupun mahasiswa yang masih dalam melanjutkan sekolah.

10. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah kebutuhannya yang sudah didasarkan atas kesediaan membayarkan upah tertentu sebagai imbalannya. Pemberi kerja bermaksud menggunakan atau meminta sekian orang karyawan dengan kesediaan membayar upah sekian rupiah setiap waktu. Jadi dalam permintaan ini sudah ikut dipertimbangkan tinggi rendahnya upah yang berlaku dalam masyarakat, atau yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan (Suroto, 1992).

11. Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia (Pujoalwanto, 2014)

Menurut Soekirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Irawan dan Suparmoko (2002) mendefinisikan pengangguran adalah mereka yang berada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan menurut Suparmoko (2007) pengangguran adalah ketidak mampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan.

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan mereka belum mendapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan.

a. Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2006) macammacam pengangguran berdasarkan jam kerja dapat digolongkan antara lain pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terbuka.

Menurut Lipsey, dkk (2001) berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibedakan menjadi empat, yaitu pengangguran

normal/friksional, pengangguran siklis, pengangguran struktural, dan pengangguran upah rill.

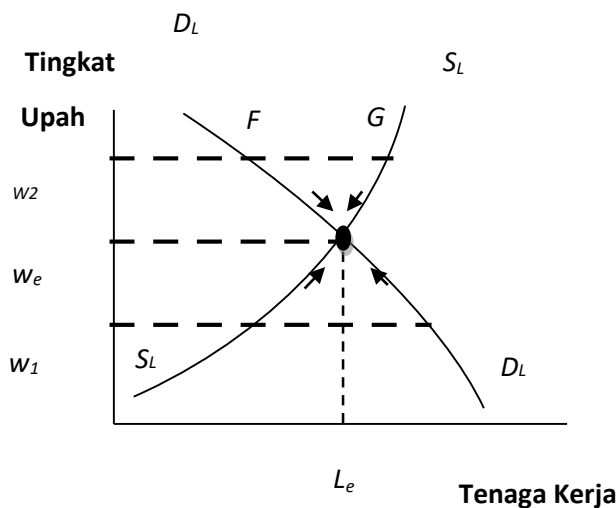
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang bertujuan guna untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah angkatan kerja yang terserap oleh pasar tenaga kerja, Badan Pusat Statistik (2015) telah menerapkan rumus yang biasa dipakai dengan suatu ukuran yang dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Besarnya TPAK dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003). Menurut Ricardo (Deliarnov, 2009) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut sebagai upah alami (*natural wage*). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003).



Sumber: Todaro (2000)

Gambar 2.3. Penentuan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Dan Tingkat Upah: Pendekatan Pasar Bebas

Gambar 2.2, titik w_e melambangkan tingkat upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada w_2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni w_e . Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w_1 , jumlah total tenaga

kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium, W_e . Kelemahan dari model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah dan lapangan kerja khususnya di negara berkembang. Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat w_e yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

Menurut Todaro (2000), tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus-menerus turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda negara – negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah dan gaji riil di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan bertambah buruk. Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru,

manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap. (Sukirno, 2008)

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30):

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya;
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja;

3. Produktivitas marginal tenaga kerja;
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha;
dan
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2008).

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah minimum sebagai *”Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap... ”*. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian

kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 13/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah minimum tetap didasarkan pada KHM. Pada masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:

1. Kebutuhan hidup minimum (KHM);
2. Index Harga Konsumen (IHK);

3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya;
4. Standar upah minimum di daerah sekitar;
5. Kondisi pasar kerja; dan
6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Menurut Iksan (2010), masalah dalam penetapan upah minimum regional adalah pada metode perhitungannya. Ada perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal ini mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang umumnya sektor padat karya

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Sumarsono (2009), pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu :

- a. menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- b. mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
- c. menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

Selanjutnya Sumarsono (2009) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik

menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Adam Smith (1776) dalam Pressman (2002), melalui *The Wealth of Nations* menganalisis apa yang menyebabkan standar hidup meningkat dan menunjukkan bagaimana kepentingan diri dan persaingan berperan dalam pertumbuhan ekonomi (dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan). Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena adanya proses mekanisasi dan pembagian kerja, selanjutnya pembagian kerja akan membuat produktivitas pekerja meningkat.

Menurut Bentham (1948) dalam Pressman (2002), pemerintah memiliki tanggung dan menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya antara melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Marshall (1923) dalam Pressman (2002) juga melihat ekonomi dari pertimbangan moral untuk membantu yang miskin, selain pertimbangan pasar, karena itu ia secara khusus memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pasar tenaga kerja. Menurut Marshall, persediaan tenaga kerja yang tidak terlatih ditentukan oleh *prinsip populasi Malthusian*. Sebagai reaksi terhadap upah yang tinggi, populasi akan meningkat dan persediaan tenaga kerja juga akan meningkat.

13. Indek Gini

Ketimpangan distribusi pendapatan ini umumnya merupakan salah satu inti permasalahan dalam negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan perseorangan sendiri merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga (Todaro dan Smith, 2004). Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

14. Pembangunan dengan pemerataan

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000).

a. Argumen tradisional

Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa

mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penyetoran kebawah (*trickle down effect*) secara alamiah.

b. Argumen tandingan

Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomorudakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro,2000). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu;

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data – data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan

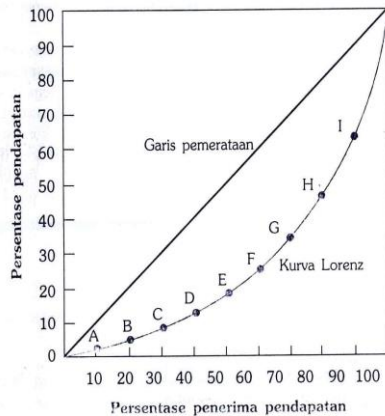
pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan koefisien Gini.

15. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.

Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. (Lincoln Arsyad, 1997)



Gambar 2.4 Kurva Lorenz

16. Indeks atau Rasio Gini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh *C.GINI* yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Y

Keterangan:

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

K = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

Namun dalam studi empiris terutama dalam *single country*, ternyata kemiskinan **tidak identik** dengan kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas **belum** mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2001) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini (*Gini ratio*) menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberapa negara Amerika Latin yang mempunyai tingkat *Gini ratio* rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah

dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.

Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan.

Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada *cross variable study* dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.

B. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini peneliti ingin memberikan beberapa penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Adams dan Page (2005) melakukan penelitian di 71 negara berkembang dengan menggunakan metode panel data. Variable yang digunakan adalah international migran, remitansi dan distribusi tidak merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi internasional dan remitansi memiliki hubungan yang kuat dan memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang. Kenaikan remitansi sebesar 10% akan menurunkan orang-orang yang berada di garis kemiskinan sebesar 3.5%.

Selanjutnya Banga dkk (2008) menganalisis pengaruh penerimaan remitansi terhadap kemiskinan di negara berkembang. Metode yang digunakan adalah data panel, dengan *cross section* sebanyak 77 negara dan *time series* pada kurun waktu 1980-2008. Penelitian ini menggunakan beberapa tahap. Pertama, menunjukkan pengaruh penerimaan remitansi terhadap kemiskinan di 77 negara berkembang *dan kedua*, memisahkan menjadi dua kelompok negara yang memiliki *share* remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan lebih dari 5 persen. Variabel yang digunakan merujuk pada metode empiris dari penelitian terdahulu diantaranya variabel kemiskinan sebagai fungsi dari pendapatan per kapita, ketidakmerataan (*inequality*) dan remitansi. Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan yang dipakai terbagi menjadi tiga bagian yakni tingkat kemiskinan per kapita di \$1.25 per hari, kesenjangan kemiskinan di \$1.25 per hari dan kesenjangan kemiskinan di \$2 per hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di \$1.25 per hari, sedangkan hubungan remitansi terhadap kesenjangan kemiskinan di \$1.25 per hari dan \$2 per hari tidak signifikan. Variabel lainnya seperti pendapatan per kapita dan ketidakmerataan (*inequality*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tiga variabel kemiskinan tersebut.

Kemudian Adams R, Cuecuecha (2008) juga melakukan penelitian tentang remitansi dan kemiskinan di Ghana. Variable yang digunakan adalah pendapatan, pengeluaran pemerintah, kesehatan, pendidikan dan remitansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remitansi memiliki hubungan yang

kuat dan memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Ghana. Dan peningkatan remitansi terhadap kemiskinan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 69.4 persen.

Selain itu penelitian Chukwuone, dkk (2012) di Nigeria menunjukkan bahwa total remitansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (pengeluaran per kapita). Semakin tinggi total remitansi yang diterima, semakin tinggi pula pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah remitansi yang diterima oleh rumah tangga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemiskinan secara tidak langsung. Peningkatan remitansi terhadap kemiskinan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9.7 persen di Nigeria.

Dalam kasus negara Pakistan, Qayyum, dkk (2011) menganalisis dampak remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, GDP, remitansi, investasi, *Human Development Index* (HDI), perdagangan bebas (*trade openness*). Metode yang digunakan adalah menggunakan metode panel data yang terdiri dari *cross section* di 3 kabupaten di Pakistan dan *time series* pada rentang waktu 1973-2010. Adapun hasil dari estimasi menunjukkan bahwa pengiriman uang memiliki dampak yang kuat dan signifikan secara statistik terhadap pengentasan kemiskinan sehingga menunjukkan bahwa ada potensi potensial yang besar terkait dengan migrasi internasional untuk orang-orang miskin di negara-negara berkembang seperti Pakistan.

Selain itu penelitian Imai, dkk (2011) menganalisis pengaruh penerimaan remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP per kapita riil, *share* remitansi terhadap GDP (persen), GDP per kapita riil, FDI, *trade openness* dan kemiskinan per kapita \$1.25 per hari. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode panel data yang terdiri dari *cross section* sebanyak 24 negara asia dan pasifik dan *time series* pada rentang waktu 1980-2009. Adapun hasil dari estimasi menunjukkan bahwa penerimaan remitansi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan per kapita secara langsung.

Sedangkan penelitian yang di lakukan di Asia, Vargas, dkk (2009) menganalisis pengaruh penerimaan remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Asia dengan data tahunan atau *time series*. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi, kesenjangan kemiskinan, GDP per kapita, tingkat pendidikan, dan GDP deflator. Hasil dari estimasi menunjukkan bahwa penerimaan remitansi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan remitansi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. 10 persen peningkatan *share* remitansi terhadap GDP akan meningkatkan pertumbuhan tahunan sebesar 0.9 hingga 1.2 persen. Dan peningkatan *share* remitansi terhadap GDP akan menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan sebesar 0.7 hingga 1.4 persen.

Penelitian tentang remitansi dan kemiskinan juga dilakukan di Indonesia. Nahar dan Arshad (2017) meneliti tentang efek remitansi terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah remitansi, kemiskinan, GDP per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, koefisien gini untuk mengukur pendapatan, inflasi dan nilai tukar. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode data *time series* pada rentang waktu 1983-2015. Adapun hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel dari enam variabel signifikan, yaitu remitansi, inflasi, dan nilai tukar. Studi ini menemukan bahwa peningkatan remitansi menyebabkan pengurangan kemiskinan sebesar 2,56%. Remitansi dan nilai tukar memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Bila pengiriman uang dan nilai tukar meningkat, kemiskinan akan berkurang. Di sisi lain, inflasi memiliki hubungan positif dengan kemiskinan.

Abdi (2016) juga menganalisis pengaruh penerimaan remitansi terhadap pendapatan per kapita dan kemiskinan di Indonesia. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan 2000, jumlah penduduk miskin, pertumbuhan produk domestik regional bruto (LPDRB) atas dasar harga konstan 2010, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, penerimaan remitansi, dan penanaman modal asing. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode panel data yang terdiri dari *cross section* sebanyak 15 provinsi di Indonesia dan *time series* pada rentang waktu 2007-2015. Adapun hasil estimasi pada model pertama, menunjukkan bahwa

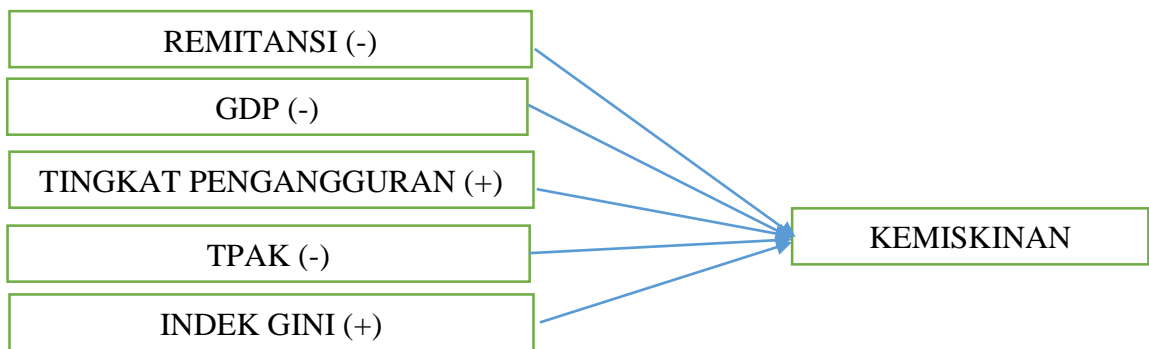
variabel penerimaan remitansi berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap pendapatan perkapita dan hasil estimasi model kedua, menunjukkan bahwa penerimaan remitansi tidak berpengaruh secara nyata atau tidak signifikan terhadap kemiskinan 15 provinsi di Indonesia.

Dan yang terakhir yaitu Wirastyani dkk (2016) melakukan penelitian tentang migrasi internasional dan pemanfaatan remitansi dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 30 orang TKI dan 30 orang non TKI yang dipilih secara *purposive sampling*. Dari hasil analisis terhadap variabel independen (jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan, jumlah tanggungan keluarga, luas kepemilikan lahan dan jumlah sumber pendapatan) hanya dua variabel yang berpengaruh nyata terhadap keputusan melakukan migrasi internasional, yaitu umur dan jumlah tanggungan keluarga. Dari analisis terhadap variabel independen (negara tujuan, jenis pekerjaan, status migrasi, pendapatan, dan lama bekerja di luar negeri), hanya dua variabel yang berpengaruh nyata terhadap besarnya remitansi yaitu pendapatan dan lama bekerja di luar negeri. Pemanfaatan remitansi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga TKI namun belum memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan di lingkungan TKI karena masih sedikitnya TKI yang menggunakannya untuk usaha produktif.

C. Kerangka Pemikiran

Remitansi menjadi stimulasi dari keuangan eksternal yang sangat penting bagi negara berkembang. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah remitansi yang cukup besar (BNP2TKI 2015). Remitansi menjadi dampak positif dari adanya peluang yang besar dalam melakukan migrasi internasional. Pengaruh migrasi internasional terhadap kesejahteraan rumah tangga sejalan dengan adanya pengiriman remitansi dari para migran. Biasanya remitansi digunakan untuk memperbaiki rumah, kesehatan keluarga, untuk pendidikan anak, maupun dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha. Remitansi juga dapat membantu distribusi modal ke pedesaan, terutama peluang berusaha dan bekerja. Remitansi yang masuk ke Indonesia memiliki tren yang meningkat. Sehingga remitansi diharapkan terus menjadi sumber asupan pendapatan tambahan untuk rumah tangga TKI sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan konsumsi dan investasi.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, peneliti ingin melihat dan menganalisis sebagai berikut, tahap pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah memaparkan kondisi penerimaan remitansi di Indonesia pada tahun 1983-2016. Tahap pertama, menganalisis perkembangan migrasi tenaga kerja Indonesia dan penerimaan remitansi di Indonesia. Kedua, menganalisis pengaruh penerimaan remitansi terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam tinjauan pustaka (literature), hipotesa dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel remitansi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. Diduga variabel GDP memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
3. Diduga variabel pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Diduga variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5. Diduga variabel indek gini memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan.